

**PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM DAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA DI KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

OLEH

AKHSAN ARIF

1296142003

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Pengesahan Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar No: /UN.36.22/KL/2016,
untuk membimbing saudara :

Nama : Akhsan Arif

Program Studi : 1296142003

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan Produk Domestik
Regional Bruto Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Bone

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diajukan di depan
panitia ujian skripsi Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Makassar.

Makassar, November 2016

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. Basri Bado, S.Pd, S.P., M.Si.
NIP 19740109200501 1 001

Diah Retno Dwi Hastuti, S.P., M.Si
NIP 19790126 2014 04 2 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan Akhan Arif dengan Nomor Induk Mahasiswa 1296142003, berjudul Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone, telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Nomor 6675/UN36.22/KM/2016 untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan pada tanggal 2 Desember 2016.

Disahkanoleh,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar

Dr. H. Muhammad Azis, M.Si.

NIP. 19591231 198601 1 005

Panitia ujian :

- | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Syamsu Alam, S.Si., M.Si | (.....) |
| 4. Pembimbing I | : Dr.Abd. Rahim.,S.P., M.Si | (.....) |
| 5. Pembimbing II | : Andi Syamsir, S.Pd.,M.Si | (.....) |
| 6. Penguji I | : Sry Astuti., S.E.,M.Si | (.....) |
| 7. Penguji II | : Diah Retno dwi Hastuti., S.P.,M.Si | (.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhsan Arif
Nim : 1296142003
Tempat Tanggal lahir : Bone, 01 November 1993
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul : Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan Produk domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone

Dengan pembimbing masing-masing:

1. Dr.Abd Rahim , S.P., M.Si.
2. Andi Samsir, S.Pd., M.Si.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli, bukan dari unsur ciplakan/plagiat, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku dan menanggung risiko yang diakibatkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2017

Diketahui oleh

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Membuat Pernyataan

Dr. Basri Bado, S.Pd.,M.Si
NIP. 19740109 200501 1 001

Akhsan Arif
NIM. 1296142003

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

**Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya anda tidak
pernah berani untuk mencoba**

Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan

**Kupersembahkan Karya ini dengan tulus dan ikhlas Untuk Bapak dan
Ibuku Tercinta serta Saudara-Saudaraku yang telah banyak membantu dan**

**Mendoakan dengan Penuh Keikhlasan, Semoga Allah SWT senantiasa
menganugerahkan Rahmat Petunjuk dan karunianya kepada kita Semua**

Amin Ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul *"Pengaruh Tingkat Upah Minimum Dan Produk Domestic Regional Bruto Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Bone"* ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Muhammad Azis, M.Si beserta seluruh stafnya yang telah membantu dan memberikan bantuannya.
2. Bapak Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar Dr. Basri Bado, S.Pd., M.Si.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. Abd. Rahim, S. P., M. Si dan Andi Samsir, S.Pd., M. Si yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Sry Astuty, S.E, M.Si selaku penasihat akademik yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.
5. Penelaah I dan Penelaah II, Ibu Sri Astuty, S.E., M.Si dan Bapak Andi Samsir, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan masukan, saran, dan kritikan, koreksi serta arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Para dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, Bapak Abdul Rahman, S.Pd., M.Si, M. Si, Bapak Syamsu Alam, S.S., M.Si dan Bapak Muhammad

Imam Maruf, S.P., M.Sc dan segenap bapak/ibu dosen yang tidak penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan serta secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan disiplin ilmu kepada penulis selama ini.

7. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, para stafnya yang telah membantu untuk memberikan data-data kepada penulis.
8. Keluarga besar Ekonomi Pembangunan angkatan 2012 terkhusus kelas B, dan Anak-anak D’Kost saya ucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan dan doannya untuk penulis.
9. Keluarga saya yang utama bapak saya H.Muhammad Arif, ibu saya Hasnah, dan Kakak saya Muh.Nur, Muh.Ridwan, Irma suryani, Fitriani, Nailah Arif, Akmal Hidayat dan Adik-adik saya Askar Arif, Nafilah,H.Kanna dan H.Landusaya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus Try Phandri Dahlan, Aswindah Amelia Kamil, Muh. Syamsir Sain, Juandi Jafar , Rustam, Asdar Darwis, Reza Safruddin, Ashari Ramadhan, Mandra, Fajrul Islam Arsyad, Nurhalisah, Septaty Rahayu Ningsih untuk angkatan muda D’kost Oned, Yayat, Ari, Tangngah dan senior andalanku kanda Agus, kanda Sarif, dan Kanda Aan terima kasih atas semangat dan bantuan kerja samanya.
11. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara/saudari, TheLastGeneration Pak Owner Polgan Irfandi jafar, Wakil Anwar AJL,Puang Andir Irwan, Puang Maman, Puang Iber,Puang Sandy Dolsky, Puang Akho, Bang Fadly, Bang amal, Bang Ocha, Ibu Andini Darwis Uci, Kakak Acci, My queen Ammi , Tante Una, Endorse Vika. Sekali lagi terima kasih atas semuanya.
12. Dan yang terakhir saya ucapkan banyak sayang dan terima kasih untukmu ST ZULAEHA NONES selama ini sudah banyak membantu dan terus memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih banyak atas doanya.

13. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang tak sempat penulis sebut namanya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Makassar, 30 November 2016

Penulis

RINGKASAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Salah satu indikator yang penting dalam konsep kependudukan untuk meningkatkan keterlibatan penduduk dengan kegiatan perekonomian yang produktif. Indikator ini mempunyai arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan, baik secara regional ataupun nasional karena ukuran ini biasa digunakan untuk mengetahui tingkat persediaan tenaga kerja TPAK merupakan perbandingan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Upah Minimum ialah suatu standar minimum yang dipakai oleh pelaku industri atau para pengusaha dalam membayarkan upah kepada pekerja di lingkungan kerja atau usahanya.

Oleh karena adanya perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi di Indonesia, maka di setiap provinsi pun terdapat perbedaan dalam pemberian upah minimum kepada para pekerja dalam suatu perusahaan, Istilah ini kemudian disebut dengan Upah Minimum Provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat upah minimum dan PDB dari tingkat partisipasi angkatan kerja di tulang kabupaten. Penelitian ini menggunakan data time series dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear dengan uji statistic dan uji asumsi klasik.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan penelitian pustaka. Penelitian pustakan merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi dari literatur yang terkait dengan penelitian ini, seperti jurnal, skripsi, dan buku terbitan lainnya yang berhubungan

dengan penelitian ini, serta data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan uji statistik. Uji sifat yang lain adalah uji F dan t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,721, sedangkan nilai F tabelnya sebesar 4,757. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti secara simultan (menyeluruh) variabel-variabel bebas (upah minimum dan PDRB) memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat (tingkat partisipasi angkatan kerja); sedangkan uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Dengan menggunakan uji asumsi klasik hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas pada variabel PDRB, suku bunga, dan inflasi karena nilai VIF dari ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10.

SUMMARY

Labor Force Participation Rate (LFPR) is One of the indicators that are important in the concept of population to increase the involvement of people with productive economic activities. This indicator has significance for the purposes of development planning, especially in the field of employment, either regionally or nationally because this measure is used to determine the level of labor supply LFPR is the ratio of the labor force and the working age population. Minimum wage is a minimum standard that is used by industry or employers in paying wages to workers in the workplace or business. Due to the differences in the proper fulfillment in every province in Indonesia, then in every single province there are differences in the minimum wage to workers in a company, this term is then called by the Provincial Minimum Wage. GRDP is basically the total value added generated by all business units within a given area, or the total value of final goods and services produced by all economic units in an area. Regional economic growth is defined as the increase in Gross Domestic Product (GDP), regardless of whether the increase was greater or less than the population growth rate or whether changes in economic structures occurs or not. This means that the economic growth of the region directly or indirectly create jobs

The purpose of this study was to determine the level of minimum wages and GDP of the labor force participation rate in the district bone. This study uses time series data with the data analysis method used is linear regression with statistical test and classical assumption.

Data collection techniques used in this study, by the research literature. Research library to a research methods to obtain information from the literature associated with the study, such as journals, theses, and books other publications related to the study, and the data from the Central Statistics Agency (BPS) South Sulawesi by using statistical test ,

Test the nature of the other is F and t test. F-test was used to test the effect of simultaneous independent variables on the dependent variable. From the F test results showed that the calculated F value of 5.721, while the F table value of 4.757. Because the $F_{count} > F_{table}$, means simultaneously (completely)

independent variables (the minimum wage and GDP) have a significant influence on the dependent variable (the rate of labor force participation); whereas the t test was used to test whether the independent variable partial effect on the dependent variable.

By using the classic assumption test multicollinearity test results using Inflation Variance Factor (VIF) indicates the absence of multicollinearity in the GDP variable, interest rates, and inflation for the VIF value of these three variables is smaller than 10.

ABSTRAK

AKHSAN ARIF, Pengaruh Tingkat Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Tulang Kabupaten. (dibimbing oleh Dr. Abd. Rahim, S.P., M.Si dan Andi Syamsir, S.Pd., M.Si). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat upah minimum dan PDB dari tingkat partisipasi angkatan kerja di tulang kabupaten. Penelitian ini menggunakan data time series dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear menggunakan SPSS21. Hasil analisis ini adalah menunjukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Kata kunci : Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

ABSTRACT

AKHSAN ARIF, The Effect Of The Minimum Wage Level And The Regional Domestic Product Of The Labor Force Participation Rate In The District Bone. (Supervised By Dr. Abd. Rahim, S.P., M.Si dan Andi Syamsir, S.Pd., M.Si). The purpose of research is to determine the minimum wage level and the GDP of the labor force participation rate in the district bone. This study uses time series data with the data analysis method used is multiple linear regression using SPSS21. The results of this analysis is to show that the level of the minimum wage take effect positive and significant impact on labor force participation rate, and the GDP significantly influence the level of labor force participation.

Key word : Minimum wage, Gross Regional Domestic Product and The labor Force Participation rate

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SUMMARY	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Teori Tenaga Kerja.....	9
2.2.2 Tingkat Upah	21
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	34
2.4 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.2 Variabel dan Desain Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sampel Data Penelitian	38
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Rancangan Analisis Data.....	40

3.6.1 Uji Asumsi Klasik	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	45
4.3 Hasil Penelitian.....	48
4.3.1 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi	
Angkatan Kerja di Bone	51
4.3.2 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Di Bone.....	52
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Upah Minimum dan PDRB Kabupaten Bone 2009-2013.....	3
Tabel 2.1 Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bone 2009-2013.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 3.1 Desain Penelitian	38
Grafik 4.1: Trend Tingkat Upah Minimum, PDRB dan TPAK Bone.	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Olah Data.	56
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kependudukan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, karena akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Kaum klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus berpendapat akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk yang akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Penduduk akan berproduktivitas sebagai tenaga kerja akan mengalami kesulitan dengan banyak kompetitor dan sedikitnya lapangan kerja, tetapi ada pula penduduk yang menganggur yang akan menekan standar hidup bangsanya menjadi semakin rendah.

Imbasnya penduduk yang selalu berkembang menuntut perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua memerlukan lebih banyak investasi, dan investasi berasal dari tabungan yang disisihkan untuk kepentingan modal berproduktivitas. Bagi negara berkembang sangat sulit memiliki kapital karena unsur SDM semakin banyak dan tidak ada sumber produktivitas yang dilaksanakan sehingga tidak ada pendapatan, sumber tabungan pun tidak ada (Irawan dan Suparmoko, 2012).

Kesejahteraan masyarakat tercipta karena terdapat daya beli masing-masing individu. Oleh karena itu, individu harus melakukan produktivitasnya

untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Problematika yang terjadi pada saat ini minimnya akses dalam pemanfaatan sumber daya demografi dalam input produksi menghilangkan intensitas produktivitasnya, sehingga tidak ada timbal balik, jumlah produksi barang dan jasa yang langka serta naiknya harga lalu ditambah dengan daya beli masyarakat karena tidak ada produktivitas yang dihasilkan.

Tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tidak dibarengi dengan perluasannya lapangan akan menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, tujuan dan proses pembangunan, maupun sebagai sumber daya manusia yang dituntut untuk dapat melakukan fungsinya bukan hanya sebagai masukan dalam kegiatan produksi, juga dapat mengeksistensikan kemampuan sebagai pengelola pembangunan tidak hanya dibutuhkan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, perhatian terhadap pentingnya peranan tenaga kerja dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan di Kabupaten Bone sangat besar. Seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada semaksimal mungkin, guna tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Selanjutnya dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) salah satunya yaitu tingkat upah, biasanya disebut dengan upah minimum regional (UMR) yang merupakan suatu standar

minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Penetapan upah ini dilakukan setiap tahun dengan proses yang panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Isti dan Yuswanto (2006) menyatakan bahwa upah berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangannya ditunjukkan tabel.1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Upah Minimum dan PDRB Kabupaten Bone 2009-2013.

No	Tahun	Tingkat Upah (Rp)	PDRB (Rp)
1	2009	905.000	2.985.992,41
2	2010	1.000.000	3.213.085,05
3	2011	1.100.000	3.412.322,54
4	2012	1.200.000	3.685.697,32
5	2013	1.440.000	3.910.248,32

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2014)

Menurut Sukirno (2006), penyerapan tenaga kerja menjadi suatu hal yang teramat penting dalam peningkatan ekonomi secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada jumlah produksi barang dan jasa meningkat yang berpengaruh pada aktifnya perdagangan. Pada teori Adam Smith mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai pada titik maksimum dengan melibatkan 2 unsur melalui pertambahan penduduk, serta pertumbuhan *output* total. Kolaborasi dengan pertambahan penduduk ini yang melahirkan karya produktif yang berpedoman pada peningkatan *outputnya* akan

tetapi, pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi harus dikolaborasikan dengan penggunaan tenaga kerja maksimum.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai, seiring tingkat produksi yang semakin meningkat. Dalam pandangan didasarkan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan, apabila produsen menciptakan barang dan jasa yang baru dan beraneka ragam serta menaikkan kuantitas produksinya maka terciptalah sebuah pasar sehingga di dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang tersebut, dengan kata lain penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan.

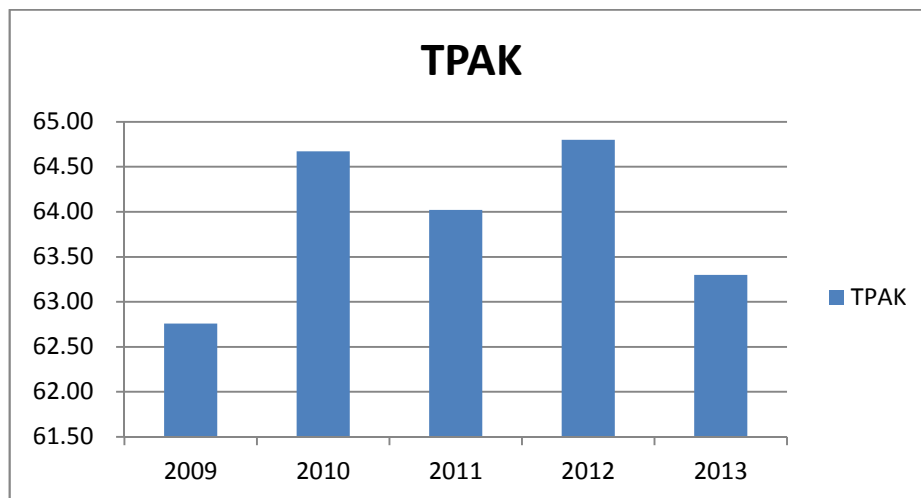
Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa upah minimum di Kabupaten Bone mengalami kenaikan setiap tahunnya, berawal dari tahun 2009 yang hanya Rp 905.000 hingga mencapai Rp 1.440.000 di tahun 2013. Penetapan tingkat upah minimum tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerjaanya, dan penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhnya kebutuhan hidup layak.

Di Indonesia, pemerintah sudah lama mengatur tentang pengupahan melalui Pengaturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap (Sulistiwati, 2012; 3). Selain upah minimum, PDRB juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK) dimana jika PDRB meningkat akan menaikkan jumlah produksi sehingga memicu meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dari data pada tabel 1.1 diketahui bahwa PDRB di Kabupaten Bone tiap tahunnya mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.985.992,41 dan meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 3.910.248,32. Disadari bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam penyediaan tenaga kerja yakni bahasa belum memadainya penggunaan tenaga kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia peningkatan hidup masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah agar dapat membuat keputusan dasar yang tepat.

Salah satu indikator yang penting dalam konsep kependudukan untuk meningkatkan keterlibatan penduduk dengan kegiatan perekonomian yang produktif adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini mempunyai arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan, baik secara regional ataupun nasional karena ukuran ini biasa digunakan untuk mengetahui tingkat persediaan tenaga kerja TPAK merupakan perbandingan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Adapun data TPAK di Kabupaten Bone ditunjukkan gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bone 2009-2013.

Sumber: BPS Sulawesi Selatan (2014)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa penanganan yang baik dengan sendirinya akan menjadi beban bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang dan berkelanjutan yang antara lain berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tersebut akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, tingkat partisipasi sekolah, dan angkatan kerja, yang tentunya akan memasuki pasar tenaga kerja. Tetapi apabila pertumbuhan penduduk usia kerja lebih banyak yang masuk ke dalam golongan bukan angkatan kerja akan menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi rendah dan selanjutnya akan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, permasalahan ketenaga kerjaan di Kabupaten Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga mengalami perubahan untuk dirasa membuat gambaran mengenai permasalahan tenaga kerja dan tendesinya untuk daerah Kabupaten Bone yang sangat di

butuhkan dalam perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, penulis menelusuri permasalahan tersebut dalam formulasi sebagai berikut : **Bagaimana pengaruh Tingkat Upah Minimum dan PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone.**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah minimum dan PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone tahun 2009-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi untuk melengkapi referensi-referensi yang telah ada, sehingga bermanfaat bagi penulis maupun orang lain.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi/ kebijakan ketenaga kerjaan akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Sarsi (2014) tentang Pengaruh tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Riau.

Penelitian lainnya oleh Rini Sulistiawati mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Angkatan Kerja dan PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2001-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK, jumlah angkatan kerja dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan Rachim (2013) mengenai analisis pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Sulsel periode 1996. Tujuan Penelitian untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan periode

1996. Model Regresi Berganda menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan, sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan periode 1996.

Penelitian yang dilakukan Noviyanti (2004) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia menurut jenis kelamin tahun 2009 dan 2001. Variabel dependen-nya adalah TPAK, sedangkan variabel independent-nya adalah PDRB per kapita, tingkat upah, jumlah penduduk laki-laki usia kerja yang masih bersekolah, jumlah penduduk laki-laki usia kerja yang mengurus rumah tangga, jumlah penduduk wanita usia kerja yang masih bersekolah, dan jumlah penduduk wanita usia kerja yang mengurus rumah tangga. Dari penelitian didapatkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh pada TPAK, tingkat upah berpengaruh positif pada TPAK, sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang masih bersekolah berpengaruh negatif pada TPAK, dan jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga juga berpengaruh negatif pada TPAK Indonesia.

Dari semua penelitian terdahulu diatas, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Dimana diantaranya adalah upah, pengeluaran pemerintah, PDRB, dan investasi.

2.2 Landasan Teori

Dalam hal ini akan dibahas beberapa pengertian yang terkait dengan tenaga kerja angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran.

2.2.1 Teori Tenaga Kerja

Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan

pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antarlain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. walaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetapsaja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas *marjinal labor* turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

Teori Harrod Domar

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

Teori Pasar Tenaga Kerja

Solmon dalam Sinaga (2005) menjelaskan, bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebentar saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar yaitu: setiap perusahaan yang menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula. Dimana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi.

Teori penawaran dan permintaan tenaga kerja

Suparmoko dan Maria dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja

maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kurva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (*backward bending curve*).

Menurut kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya di menangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu mendapat pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Pengurangan upah juga akan terjadi jika teori ini benar bila memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. hal yang mendasar pada upah mempengaruhi produktivitas pekerja ini, lebih dikaitkan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja dibayar dengan upah memadai

bias membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif (Mankiw, 2003).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009). Pasar tenaga kerja sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003).

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja seperti ketidak seimbangan akan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah. Ketidak seimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan tenaga kerja atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.

Menurut Adam Smith peningkatan output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah orang melalui sistem pembagian kerja yang bersumber dari 3 hal yaitu pertama, karena meningkatnya keterampilan setiap pekerja dalam spesialisasi pekerjaan. Kedua, karena sistem sebagai kerja mengurangi waktu yang hilang seandainya pekerja beralih dari pekerjaannya yang satu ke pekerjaan yang lain. Ketiga, karena ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan memungkinkan produktivitas pekerja.

Teori pertumbuhan Adam Smith yang sering dianggap sebagai awal dari pengajian masalah pertumbuhan secara sistematis menekankan dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dari pertumbuhan penduduk rendahnya kualitas penduduk merupakan penghalang pembangunan negara ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja dengan adanya ekonomi terutama industri jelas semakin dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Teori lain yang penting dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan .Pertama adalah teori lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerjaan merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. kelebihan pekerjaan suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan tenaga kerja di sektor lain.

Menurut teori Fei Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kelebihan buruh
2. Sumber daya alami belum dapat diolah
3. Sebagai besar penduduk bergerak disektor pertanian
4. Banyak pengangguran

Menurut Fei Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kelebihan buruh. Pertama dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah buruh output memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan ke pertumbuhan

sector lain. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan output dan perluasan usahanya.

Konsep dan defenisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh badan pusat statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *The Internasional Labor Organization (ILO)* konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu: penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Defenisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun sampai 64 tahun.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang bekerja punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Bekerja adalah kegiatan ekonomi oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut pula pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

4. Mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan diri seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen mogok dan sebagainya.

Contoh :

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan lain sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan yang menggarap sawah).
- c. Pekerjaan profesional (mempunyai keahlian tentu/khusus yang sedang tidak bekerja karena sakit menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya.

5. Penganggur terbuka, terdiri dari :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (lihat pada An ILO on Concept and Methods)

- Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut mencari pekerjaan, seperti mereka :

1. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari/ mendapatkan pekerjaan.
2. Yang sudah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas seminggu sebelum pecahan, jadi mereka yang sedang mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebastugaskan, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka.

- Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dalam mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai usaha (*own worker*) atau sebagai usaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai usaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

6. Setengah Pengangguran mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 15 jam seminggu) setengah pengangguran terdiri dari :

- Setengah pengangguran terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- Setengah pengangguran sukarela adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

7. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang libur sekolah.

8. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah misalnya : ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

9. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain di sebut diatas, yakni mereka yang inadah pension, orang-orang yang sudah catat jsmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan suatu pekerjaan seminggu yang lalu.

10. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
11. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) dalam seminggu yang lalu bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah family/kawan dan sebagainya.
12. Lapangan usaha adalah bidang dari pekerjaan/usaha perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
13. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau yang ditugaskan kepada seseorang yang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini mengikuti klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada ISCO 88.
14. Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dalam harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dimasa lalu menimbulkan permasalahan di bidang ketenagakerjaan, karena pertumbuhan penduduk usia kerja (penduduk berumur 10 tahun keatas) mengakibatkan penambahan penawaran/penyediaan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang membutuhkan pekerjaan walaupun tingkat penduduk ditekan dengan adanya program keluarga berencana, akan tetapi penawaran/penyediaan angkatan kerja masih tinggi hal ini di sebab kan terbukanya kesempatan bagi wanita memasuki pasar kerja angkatan kerja yang tinggi menimbulkan masalah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

Penduduk dalam suatu negara dibedakan atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibedakan atas bekerja dan tidak bekerja sedangkan mencari pekerjaan lebih dikenal sebagai pengangguran terbuka.

Tenaga kerja dikatakan merupakan factor produksi yang penting karena segala proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa hampir seluruhnya dikerjakan oleh manusia sebagai tenaga kerja, baik secara fisik maupun dengan menggunakan pikiran-pikirannya. Keterlibatan tenaga kerja sebagai pengelola pada tingkat produksi yang dicapai. Hal ini tergantung pada tingkat keterampilan yang disambungkan dalam proses produksi oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk membangun ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk manusia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi baik melalui pengukuran produktifitas maupun melalui pendapatan perkapita. Selain itu

kesempatan yang tersedia dan kualitas tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa. (Swasono dan Suslistyaningsih, 1983).

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah yang menyangkut sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yang dalam literatur biasanya adalah penduduk berusia 15-65 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk Indonesia 10 tahun keatas, meskipun ini bukan definisi tenaga kerja yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. (Kusumowidho, 1983).

Dapat bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah menyangkut penduduk yang mau dan dapat memproduksi barang dan jasa. Kemudian alasan penggunaan batasan umur yang dikenakan untuk tenaga kerja dengan umur 10 tahun keatas oleh Biro Pusat Statistik adalah tidak lain merupakan usaha perlindungan bagi para tenaga kerja di bawah umur dengan kata lain karena berbagai pengertian tenaga kerja, hal usia itu menjadi permasalahan, maka ditegaskan oleh pemerintah melalui Biro Pusat Statistik. Untuk mencantumkan batas usia tersebut.

2.2.2 Tingkat Upah

Teori Upah Besi

Teori upah ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang

telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.

Teori Dana Upah

Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.

Teori Upah Etika

Menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak “etis”. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga. Pendapatan adalah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, pendapatan merupakan balas jasa yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang punya majikan tapi tidak tetap.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penyusunan dan perhitungan PDRB, kegiatan ekonomi dibagi menjadi sebelas sektor, yakni sektor pertanian, industri, listrik gas dan air, bangunan dan konstruksi, angkutan dan komunikasi, perdagangan, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah dan Hankam, serta sektor jasa-jasa lainnya. Setiap sektor kegiatan ekonomi tersebut dapat diukur dan diketahui pertumbuhannya melalui perhitungan PDRB di suatu daerah pada setiap periode tertentu. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi.

Adapun pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan (1988) adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan produksi, perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggabungkan faktor, penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi seperti perubahan dalam teknik produksi, masyarakat dalam lembaga-lembaga. Perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pengertian diatas dapat dijadikan tolak ukur mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah atau wilayah. Apakah ada pertumbuhan struktur ekonomi/pola perekonomian suatu wilayah/daerah. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada proses jangka panjang yang secara berangsur-angsur bergerak atas terjadinya peningkatan pada tabungan, investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga makin meningkat pula pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara atau daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dicapai

suatu Negara atau daerah maka semakin mantap pula struktur perekonomian Negara/daerah tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi didefinisikan Sukirno (1986) sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Winardi (1983) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai perbaikan elemen-elemen produksi dasar (yaitu faktor produksi tenaga kerja, sumber alam, alat-alat serta benda capital/modal)

Menurut Case dan Fair (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keluaran total suatu perekonomian. Sedangkan menurut Nanga (2002) memberikan pengertian pembangunan ekonomi sebagai peningkatan dalam kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif yang biasanya diukur dengan *Gross National Product* (GNP).

GNP adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya dalam satu tahun.

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun } t = \frac{GNP_t - GNP_{(t-1)}}{GNP_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

- Tahun t : tahun yang dihitung pertumbuhannya
- GNP_t : GNP tahun t
- GNP : GNP tahun-tahun sebelumnya.

Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses akan gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara dapat digunakan tiga pendekatan Syafril (1999), yaitu sebagai berikut

1. Tingkat penghidupan masyarakat artinya apakah terdapat peningkatan konsumsi potensial saat sekarang dibandingkan dengan tingkat konsumsi di masa lampau
2. Sumber-sumber produksi. Apakah dalam suatu negara tersebut ditemukan sumber produksi baru, serta sumber-sumber yang ada dapat di pertahankan dan dimanfaatkan lebih efisien
3. Tingkat pendapatan nasional. Apakah pendapatan nasional sekarang lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatan nasional sebelumnya, tetapi apabila pendapatan nasional yang meningkat tidak diiringi dengan pendistribusian yang baik dan merata maka akan tidak berarti

Untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian menurut Sukirno (1996) digunakan tiga cara perhitungan yaitu

1. Cara pengeluaran, dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi oleh Negara tersebut. Hasil perhitungan ini biasanya disebut PNB.
2. Cara produksi atau cara produk neto, dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian ini disebut PDB.

3. Cara pendapatan, dalam perhitungan ini, pendapatan nasional di peroleh dengan caramenjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor Produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional (PN).

Dalam menghitung produk nasional masih sering menghadapi hambatan. Karena adanya perubahan harga yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, dalam membandingkan nilai pendapatan nasional yang dihitung menurut harga tetap sedangkan pendapatan nasional yang dinilai menurut harga berlaku pada tahun di mana produksi yang sedang dinilai. Produksi tersebut dinamakan pendapatan nasional menurut harga berlaku.

2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK menggambarkan keadaan penduduk berumur 15 tahun yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya TPAK perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Jumlah orang yang bekerja dalam suatu daerah atau wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya factor demografi, ekonomi, dan sosial. Faktor demografi yaitu tingginya jumlah penduduk faktor ekonomi di tentukan oleh keinginan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi di mana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam suatu daerah maka mereka akan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menambah pendapatannya. Sedangkan

factor sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat pelayanan kesehatan. Ketiga factor tersebut akan mempengaruhi besarnya TPAK semakin besar TPAK, maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja dalam kelompok usia kerja.

Payaman Simanjuntak (1985) mengatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK adalah:

- Pertama, jumlah penduduk yang masih sekolah. Semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah, maka akan semakin kecil jumlah TPAK.
- Kedua, TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. Semakin banyak anggota keluarga mengurus rumah tangga, maka semakin kecil TPAK.
- Ketiga, bagaimana suatu keluarga mengatur siapa yang bekerja dan yang mengurus rumah tangga pada dasarnya bergantung pada tingkat penghasilan dan jumlah dari keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang berpenghasilan besar akan mengurangi jumlah anggota keluarganya untuk bekerja. Hal ini berarti mengurangi TPAK.
- Keempat, TPAK dipengaruhi oleh umur. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah, sehingga TPAK relative besar.
- Kelima, TPAK dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, maka semakin banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sehingga TPAK suatu daerah juga semakin tinggi.

- Keenam, TPAK dipengaruhi oleh pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Maka TPAK semakin besar.
- Ketujuh, TPAK dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar TPAK.

2.5 PDRB dan TPAK

Menurut Prenggondani (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Simanjuntak (1985), merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besaran

persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Teori Solow merupakan salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara PDRB dengan TPAK. Menurut teori Solow pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB tergantung kepada penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa orientasi PDRB di suatu daerah banyak diserap oleh sektor perdagangan, industri, dan pertanian, dimana sektor perdagangan menjadi sektor paling tinggi penyerapannya dalam menjalankan proses produksi. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto PDRB akan diikuti oleh pertumbuhan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja).

Sedangkan Teori Harod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

Kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka. Jika pertumbuhan ekonomi tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung dalam suatu

lapangan pekerjaan makin besar. Sebaliknya, jika perekonomian suatu negara semakin makmur, maka semakin kecil jumlahnya orang yang menganggur.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan ekonomi sangat di perlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan bahwa kegiatan perekonomian akan menjadi luas sehingga dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sebaliknya, tanpa adanya pembangunan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan menjadi sempit. Hal ini akan berakibat pada semakin kecilnya kesempatan kerja sehingga mempertinggi tingkat pengangguran di masyarakat (Wirosuharjo, 1981).

Jadi, pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi diharapkan bahwa kegiatan perekonomian akan menjadi luas yang artinya menuntut keterlibatan angkatan kerja untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut sehingga menyebabkan TPAK ikut meningkat. Simanjuntak (1981) mengatakan TPAK dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang. di pihak lain, program pembangunan membutuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja jadi, semakin bertambah kegiatan ekonomi, semakin bertambah TPAK.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan tingginya TPAK, hal ini dimaksudkan bahwa jumlah

mereka yang terlibat dalam pasar kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan.

2.6 Tingkat Upah dan TPAK

Teori yang dikemukakan oleh Becker Untuk meningkatnya tingkat upah relatif untuk perempuan telah terjadi jangka panjang di lipatan di tingkat upah riil yang wanita bisa mendapatkan di pasar tenaga kerja ini terutama konsekuensi dari fakta bahwa perempuan telah memperoleh keterampilan lebih melalui pendidikan. Seperti telah disebutkan, tingkat upah yang lebih tinggi akan menghasilkan baik di datang dan substitusi efek dalam kerangka model becker ini. Sedangkan efek pendapatan akan bertindak untuk mengurangi jam kerja, efek substitusi terkait produksi dan kegiatan konsumsi terkait dalam rumah akan cenderung meningkat mereka. Barang akan diganti untuk waktu dalam produksi komoditas, dan barang-barang komoditas intensif akan diganti untuk barang yang intensif waktu dalam campuran rumah tangga komoditas konsumen. Kedua jenis penyesuaian akan membebaskan waktu istri dari kegiatan rumah tangga sehingga dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dalam pasar tenaga kerja. Mungkin efek substitusi telah mendominasi efek pendapatan bagi banyak perempuan, menyebabkan tingkat partisipasi mereka meningkat. Efek pendapatan bagi wanita yang sudah menikah mungkin kecil karena ukurannya akan bervariasi secara langsung dengan jumlah waktu mereka sudah mengabdikan untuk pekerjaan pasar tenaga kerja. Misalnya, efek pendapatan dari kenaikan tingkat upah akan diabaikan untuk wanita yang sudah menikah yang saat ini tidak berpartisipasi dalam pekerjaan pasar tenaga kerja.

Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan tingkat upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (*income effect*) cenderung mengurangi TPAK di pihak lain peningkatan upah membuat harga waktu sanggang (*substitution effect*). Daya substitusi dari kenaikan upah mendorong kenaikan TPAK.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi.

Clark menyatakan dalam teorinya "*Marginal Productivity Theory*" bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar, yang disebut "pekerja batas" (*marginal worker*). Itu berarti upah yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja.

Keynes (dalam Kusnendi, 2001) menyatakan teorinya berhubungan dengan semua tingkat kesempatan kerja yang mungkin terjadi (*Full Employment* maupun *Under Employment*). Dan masalah ekonomi seperti pengangguran disebabkan karena rendahnya *Effective Demand* atau Permintaan Agregat. Jadi, teori Keynes menitik beratkan kepada *demand side* sebagai unsur aktif yang menggerakkan perekonomian. J.M. Keynes (dalam Sukirno, 2004) menyatakan bahwa :

"Pengeluaran Agregat yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara/wilayah. Seterusnya, Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar

bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan memerlukan usaha serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh.”

Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.

Menurut teori ini tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.

Suparmoko dan Maria dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kuva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan

menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (*backward bending curve*).

Menurut kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya di menangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu mendapat pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Pengurangan upah juga akan terjadi jika teori ini benar bila memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Hal yang mendasar pada upah mempengaruhi produktivitas pekerja ini, lebih dikaitkan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja dibayar dengan upah memadai bias membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif (Mankiw, 2003).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua

sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktifitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2009). Pasar tenaga kerja sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003).

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja seperti ketidak seimbangan akan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah. Ketidak seimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan tenaga kerja atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.

Peranan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak didalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong insentif dan usaha swasta, dan dalam menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian. Dalam kancah perekonomian modern, peran pengeluaran pemerintah dapat ditelaah menjadi 4 peranan yaitu; (1) peran alokatif yaitu peranan pengeluaran dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi; (2) peran distributif yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan kerja dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan merata; (3) peran stabilisatif yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan

memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium; (4) peran dinamisatif yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

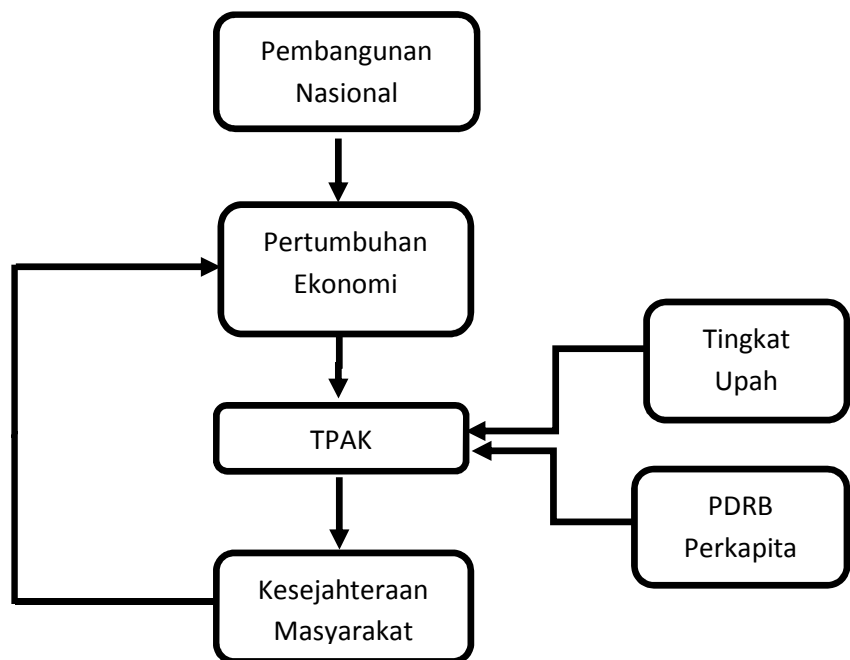
2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dimulai dari Penduduk Kabupaten Bone yang terdiri dari Tenaga Kerja dan Bukan Tenaga Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja adalah rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Tingkat Upah dan PDRB.

Upah minimum adalah satu standar minimum yang dipakai oleh pelaku industri atau para pengusaha dalam membayar upah kepada pekerja di lingkungan kerja atau usahanya sehingga upah minimum harus didasarkan pada standar kehidupan layak hidup pada masyarakat

PDRB merupakan seluruh jumlah nilai output bersih dari perekonomian yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian disuatu wilayah dengan kurun waktu tertentu, kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah pertanian, pertambangan, industri dan jasa.

TPAK yakni perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja TPAK digunakan untuk melihat tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan. Jika TPAK rendah maka menunjukkan kecil kesempatan kerja yang tersedia dan sebaiknya jika angka TPAK tinggi menunjukkan besar kesempatan kerja tersedia.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar ataupun mungkin salah. Berdasarkan rumusan Dari permasalahan diatas, maka diduga Upah minimum dan PDRB berpengaruh terhadap TPAK di Kabupaten Bone tahun 2009-2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Jenis data yang digunakan yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan PDRB yang bersekolah periode 1999-2013 Kabupaten Bone. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan literatur-literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian yang bersangkutan.

3.2. Variabel dan Desain Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan Upah Minimum dan PDRB sebagai variabel bebas (*independent variable*), sedangkan variabel tergantung (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

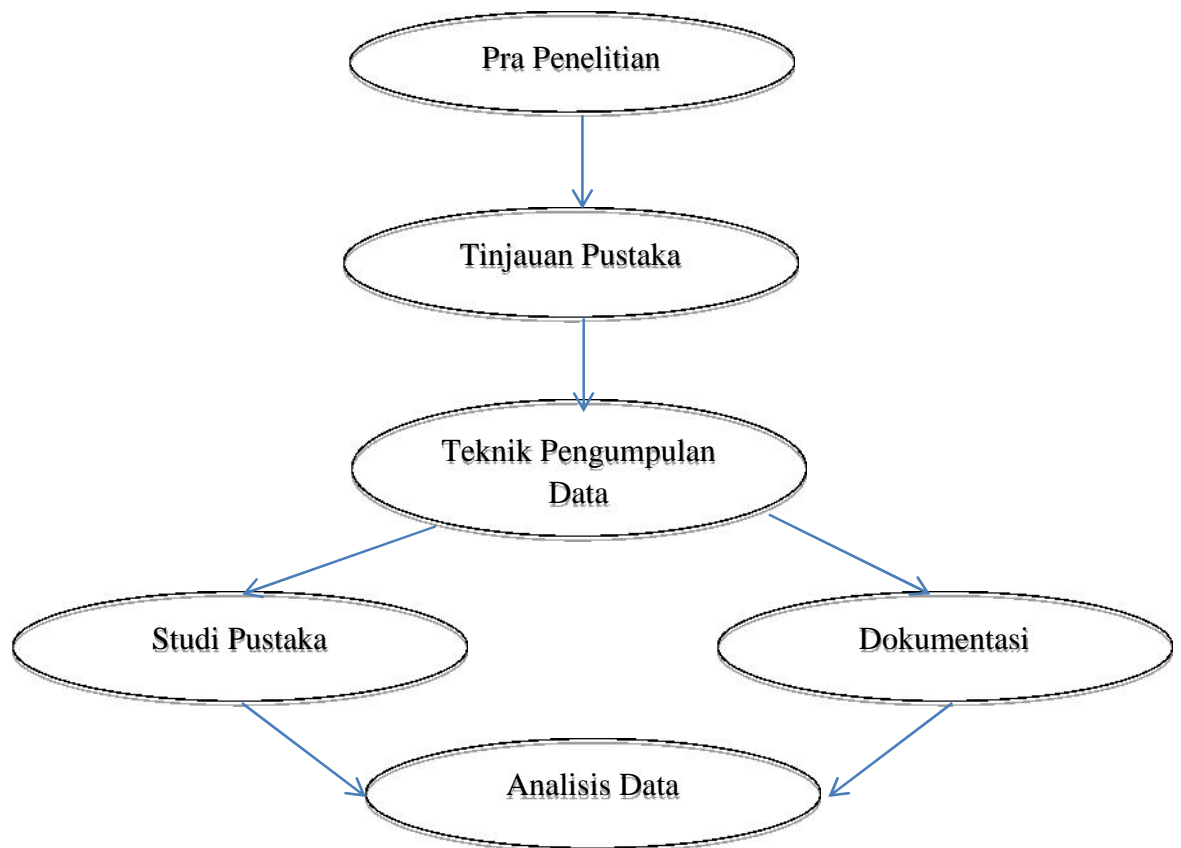
a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah faktor-faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Upah Minimum dan PDRB

b. Variabel Tergantung (Dependent Variable)

Variabel tergantung adalah variabel yang besarnya tergantung variabel bebas yang diberikan dan di ukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas, oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi variabel Tergantung adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

3.2.2. Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan atau obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, PDRB. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja yang berada pada usia produktif dalam suatu kelompok di Kabupaten Bone dari tahun 1999-2013. (satuan persen)

2. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar upah minimum yang diterapkan oleh perusahaan/industri dan pemerintahan, kepada pekerja yang berada dalam lingkungan kerjanya dan sesuai dengan kapasitasnya, data yang digunakan merujuk ke UMP (Upah Minimum Provinsi) di Sulawesi Selatan dari tahun 1999-2013 (satuan rupiah) dikarenakan data UMR (Upah Minimum Regional) tidak tersedia.

3. PDRB

PDRB adalah jumlah keseluruhan dari pendapatan daerah dalam kurung waktu satu tahun di Kabupaten Bone dari tahun 1999-2013 (satuan rupiah)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan

tertentu. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan- bahan yang relevan dan akurat. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1999-2013. Sebagai pendukung digunakan buku referensi, jurnal-jurnal ekonomi, surat kabar, serta dari browsing website internet yang terkait dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi (tercetak dan tergambar) dan studi pustaka.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan dan data relevan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang ada di Badan Pusat statistic (BPS) tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan PDRB Kabupaten Bone.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari arsip BPS Sulawesi Selatan dan BPS Kabupaten Bone.

3.5. Rancangan Analisis Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendisripsikan suatu permasalahan dan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

Untuk melihat pengaruh Upah Minimum dan PDRB, maka peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (multiple regression) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone. Bentuk persamaan regresi linear berganda Adalah sebagai berikut :

$$TPAK_t = \alpha_0 + \alpha_1 UP_t + \alpha_2 PDRB_t + e_t \dots \dots \dots (1)$$

Selanjutnya, persamaan model linear berganda diatas diubah menjadi persamaan dibawah ini :

$$\ln TPAK_t = \ln \alpha_0 + \ln \alpha_1 UP_t + \ln \alpha_2 PDRB_t + e_t \dots \dots \dots (2)$$

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone periode

1999-2013

α_0 = Intersep/Konstanta

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

UP = Upah Minimum

PDRB = Pendapatan Domestik Regional Bruto Kab. Bone

e = Kesalahan Pengganggu

t = Time Series

1. Uji t, Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependent secara nyata. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_1 diterima (signifikan) dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.
2. Uji F (simultan), Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika $f_{hitung} > f_{table}$ maka H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak
3. n memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat signifikansi 5%.

3.6. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linear tidak bias dengan varian yang minimum (*Best linier Unbiased Estimator=BLUE*) yang berarti model regresi tidak mengandung masalah.

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan pada tujuan penelitian pertama dan kedua (Rahim, 2012) mengemukakan bahwa multikolinearitas (*multicollinearity*) atau kolinearitas ganda merupakan kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model. Penyimpangan asumsi klasik dapat dideteksi dengan berbagai cara melihat hasil koefisien korelasi antar variabel (Rahim, 2012). Penelitian ini menggunakan VIF yang terdapat pada program *Statistical program for service solution (SPSS) statistics* 17. Menurut (Rahim, 2013) dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2} \dots\dots\dots(3)$$

R_j^2 diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel independen (Rahim, 2013) atau koefisien determinasi antara variabel bebas ke- j dengan variabel bebas lainnya. Selanjutnya jika nilai VIF lebih dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Tindakan perbaikan multikolinearitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tetapi perlu memperhitungkan bias spesifikasi dalam model, cara lain menambah variabel dummy (Rahim, 2013).

2. Asumsi Autokorelasi

Asumsi autokorelasi merupakan asumsi residual yang memiliki komponen/nilai yang berkorelasi berdasarkan waktu (urutan waktu) pada

himpunan data itu sendiri. Pada pengujian asumsi ini, diharapkan asumsi autokorelasi tidak terpenuhi. Penyebab terjadinya autokorelasi adalah :

1. Terdapat variabel predictor penting yang tidak dimasukkan kedalam model regresi.
2. Pola hubungan antara Y dan X tidak linear (kuadratik, kubik, atau non linear) ketika digambarkan dalam *scatterplot*.
3. Data pengamatan yang diambil merupakan data yang dicatat menurut waktu tertentu (data time series) seperti perjam, harian, mingguan, bulanan, triwulan, kuartaldantahunan.
4. Adanya manipulasi data menyebabkan residual data terbentuk secara sistematis.

Berikut adalah cara-cara mengidentifikasi adanya kasus autokorelasi:

1. Pengujian durbin-Watson yang menguji adanya autokorelasi pada lag-1. Kriteria pemeriksaan asumsi Autokorelasi residual menggunakan nilai durbin-watson (d), yaitu :
 - a. Jika $d < 2$ dan $d < d_L$, maka residual bersifat auto korelasi positif.
 - b. Jika $d > 2$ dan $d > d_U$, maka residual tidak bersifat auto korelasi
 - c. Jika $d < 2$ dan $d_L \leq d \leq d_U$, maka hasil pengujian tidak dapat disimpulkan.
 - d. Jika $d > 2$ dan $4 - d < d_L$, maka residual bersifat autokorelasi negatif.
 - e. Jika $d > 2$ dan $4 - d > d_U$, maka residual tidak bersifat autokorelasi.

Jika $d > 2$ dan $d_L \leq 4 - d \leq d_U$, maka hasil pengujian tidak disimpulkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

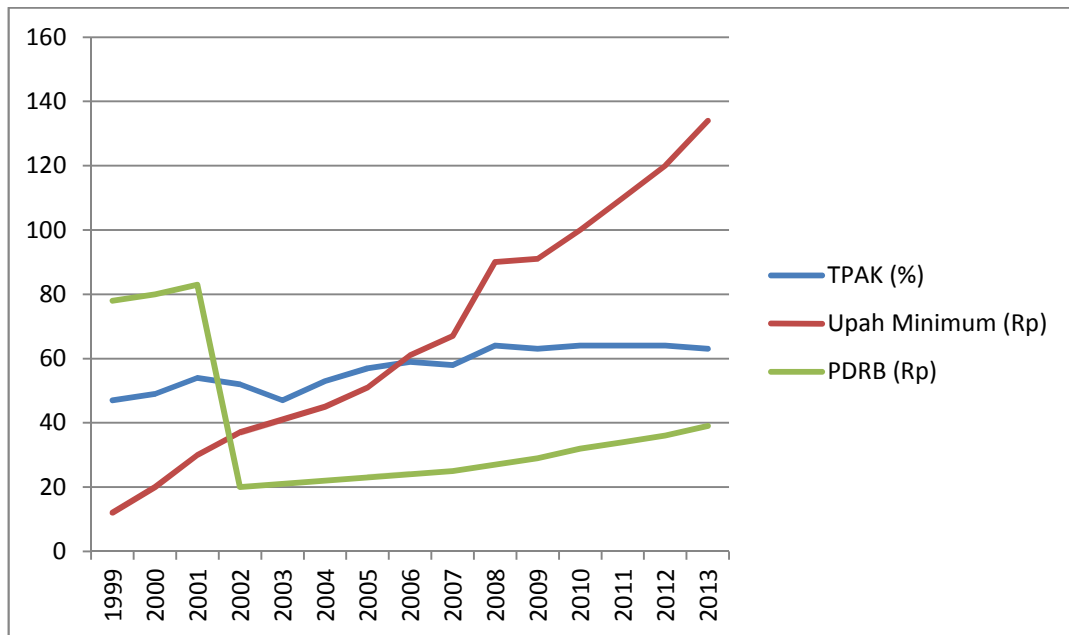
4.1.1 Wilayah Bone

Bone adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari kota Makassar. Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur.

Batas wilayah kabupaten Bone berdasarkan letak astronomis:

- Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Sedangkan dari segi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Bone sekitar 763.412 jiwa ditahun 2014, yang tersebar 372 Kelurahan/Desa dan 27 Kecamatan.



Grafik 4.1: Trend Tingkat Upah Minimum, PDRB dan TPAK Bone.

Sumber: Data diolah dari BPS Sulawesi Selatan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK menggambarkan keadaan penduduk berumur 15 tahun yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya TPAK perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas pada tahun 1999-2013, Pada tahun 1999-2001 Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak 5% dan tahun 2001-2003 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1,29%. Namun tahun 2004-2009 kembali meningkat sebesar 1,11% dan 3,31%. Kembali menurun pada tahun berikutnya sebesar 1,6% dimana hal tersebut terjadi

hingga tahun 2013 di mana tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 63.30 jiwa.

Tingkat upah minimum ditetapkan untuk menjamin bahwa para pekerja dapat menikmati sebagian standar hidup dasar walaupun tingkat upah ditetapkan terlalu tinggi di atas tingkat keseimbangan, akibatnya menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja. Walaupun bagi mereka yang masih tetap bekerja.

Tingkat upah minimum mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya di mana pada tahun 1999-2006 tingkat upah minimum sebesar Rp.129,000 sampai dengan Rp.612.000 dan kemudian meningkat kembali dengan signifikan di tahun 2007 sebesar Rp 673.200 sedangkan pada tahun 2008 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 740,520 dan untuk tahun 2010-2013 kembali mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Pada tahun 1999-2001 di mana PDRB kabupaten Bone Rp 788,369.05 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2002 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp. 2.069.953,70 dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun 2003-2013 PDRB kabupaten Bone mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2 Hasil Penelitian

Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan PDRB terhadap TPAK di Kabupaten Bone menggunakan model analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas dan autokorelasi. Tingkat Upah dan PDRB memiliki tanda harapan positif dimana setiap peningkatan tingkat upah dan PDRB akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil penelitian tentang pengaruh tingkat upah dan PDRB disajikan pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Variabel	T.H	B	t _{hitung}	S	Sig	VIF
Independen						
Tingkat Upah	+	1,541**	2,568		0,026	6,007
PDRB	+	-1,601***	-1,911		0,082	9,676
Intersep						12,472
Adjusted R ²						0,503
F hitung						5,721
DW						3,248
N						15

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Keterangan:

* : Signifikan pada tingkat kesalahan 1% (0,01) atau tingkat kepercayaan 99%

** : Signifikan pada tingkat kesalahan 5% (0,05) atau tingkat kepercayaan 95%

- *** : Signifikan pada tingkat kesalahan 10% (0,10) atau tingkat kepercayaan 90%
- Ns : Tidak signifikan
- T.H : Tanda Harapan

Berdasarkan analisis yang digunakan pada Bab III, maka diperoleh persamaan berikut:

$$TPAK_t = 12,472 + 1,541 UP_t - 1,601 PDRBP_t + e_t \dots \dots \dots (4.1)$$

Dari persamaan (4.1) maka persamaan tersebut diubah kembali dalam fungsi tingkat partisipasi angkatan kerja dengan meng-anti Ln kan sebagai berikut :

$$TPAK_t = \text{anti } Ln \ 12,472 + 1,541 UP_t - 1,601 PDRBP_t + e_t \dots \dots \dots (4.2)$$

$$= 2,964 UP_t^{1,541} PDRBP_t^{-1,601} + e_t \dots \dots \dots (4.3)$$

Nilai intercep/konstanta sebesar 12,472 pada faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa tanpa variabel independen (tingkat upah dan PDRB) maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat sebesar 12,472 %.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Dari hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas pada variabel upah minimum dan PDRB karena nilai VIF dari ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10, dapat dilihat pada tabel 4.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson*. Hasil pengujian autokorelasi dengan *Durbin-Watson* (DW) dengan nilai $DW = 3,248$, Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* (DW) maka diperoleh nilai d_L sebesar 0,946 dan d_U sebesar 1,543. Hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena $d > 2$ dan $d > d_U$ atau $3,248 > 2$ dan $3,248 > 1,543$.

Untuk mengetahui derajat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilihat dari koefisien korelasi (R). Dari hasil perhitungan, koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,781 atau 78,1 persen. Hal ini berarti korelasi antar variabel sangat kuat.

Kemudian untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi *adjusted* R^2 . Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi *adjusted* R^2 yang diperoleh sebesar 0,503 atau 50,3 persen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas pada model yang disajikan dapat menjelaskan, yaitu besarnya persentase sumbangan variabel bebas sebesar 50,3 persen terhadap naik turunnya variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 49,7 persen ditentukan oleh variabel lain di luar model tersebut.

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,721 (tabel 4.1), sedangkan nilai F tabelnya sebesar 5,735. Karena F

hitung $< F$ tabel berarti secara simultan (menyeluruh) variabel-variabel bebas (tingkat upah dan PDRB) tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat (tingkat partisipasi angkatan kerja).

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat upah memiliki nilai t hitung sebesar 2,568 dengan tingkat signifikansi 0,05 (tabel 4.1). Sedangkan nilai t tabel sebesar 2,060 hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ nilai t tabel dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat upah secara parsial berpengaruh terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan PDRB memiliki nilai t hitung sebesar 1,911 dengan tingkat signifikansi 0,10 (tabel 4.1) sedangkan nilai t tabel sebesar 1,770 hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ nilai t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja.

4.2.1 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Bone.

Variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien variabel upah minimum di Bone sebesar 1,541, artinya setiap kenaikan upah minimum 1 persen akan menyebabkan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,541 persen. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,026 < = 0,05$. Secara empiris saat

upah minimum meningkat sebesar 113.801,81 Juta US\$ maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 5,035%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isti dan Yuswanto (2006) menyatakan bahwa upah dan jumlah anak berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan di Jember sedangkan jarak antara rumah dan tempat bekerja berpengaruh negatif terhadap TPAK perempuan di Jember.

4.2.2 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Bone

Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien variabel PDRB di Bone sebesar -1,601, artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Bone sebesar -1,601 persen. Belanja Daerah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi $0,082 < = 0,10$. Secara empiris saat upah minimum meningkat sebesar 113.801,81 Juta US\$ maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 5,035%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2004) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia menurut jenis kelamin tahun 2009 dan 2001. Variabel dependen-nya adalah TPAK, sedangkan variabel independen-nya adalah PDRB per kapita, tingkat upah, jumlah penduduk laki-laki usia kerja yang masih bersekolah, jumlah penduduk laki-laki usia kerja yang mengurus rumah tangga, jumlah penduduk wanita usia kerja yang masih bersekolah, dan jumlah penduduk wanita usia kerja yang mengurus rumah tangga. Dari penelitian didapatkan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh pada TPAK, tingkat upah

berpengaruh positif pada TPAK, sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang masih bersekolah berpengaruh negative pada TPAK, dan jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga juga berpengaruh negatif pada TPAK Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat upah minimum dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab.Bone periode 1999-2013.

5.2 Saran

1. Dari hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini disarankan kepada pemerintah agar sekiranya mengeluarkan regulasi untuk senantiasa meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan perlu untuk mengkaji faktor atau variabel bebas yang lainnya, yang berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Karena hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel bebas yang lainnya. Untuk penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menambah periode tahun pengamatan sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat membandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Mardiana. 1997. *Analisis Perkembangan Penduduk Angkatan Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1985- 1995*. (Thesis).
- Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan edisi 2000-2007.
- Badan Pusat Statistik. 2006. Makassar dalam Angka 2006. BPS Kota Makassar
- Bakir, Zainab dan Chris Manning. 1984. *Angkatan Kerja Di Indonesia*. CV. Rajawali Jakarta
- BI. 2008. *Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sulawesi Selatan Triwulan-II 2008*.
- BI Makassar. Makassar Binardjo, Goro. 1997. *Analisis Mencari Kerja di Jawa Tengah* (Thesis). Program Pasca Sarjana FE-UI Jakarta.
- Faadah, Isti dan Yuswarco 2004. *Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga*. FE Universitas Jember.
- Jingan, M L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Manning, Christ. 1984. *Angkatan Kerja dan kesempatan Kerja di Indonesia Dewasa Ini dalam Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia* Disunting oleh Kartowirisuhaijo, dkk. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta
- Noviyanti, Palupi. 2004. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2000 dan 2001*. UMS Digital Library Surakarta
- S, Kusumosuwidho. 1983. *Dasar-dasar Demografi*. Lembaga Demografi FE - UI. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman, J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFE - UI. Jakarta.

Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sukirno, Sadono. 1986. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Bina Grafika: Jakarta.

Swasono, Yudho dan Sulistyaningsih Endang 1983. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja* Edisi Pertama BP FE UGM. Yogyakarta

Syahril, Salim Djasni dan Hidayat Wahyu. 1999. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara: Jakarta

Tjiptaherijanto, Prijono. 1982. *Sumber Daya Manusia Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*, LPFEUI. Jakarta

Winardi, Kamus Ekonomi, Edisi ke 7, Alumni, 1982. Bandung

Wirosuhardjo, Karton, dkk. 1986. *Kebijakan Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta



RIWAYAT HIDUP

Akhsan Arif, anak ketujuh dari Delapan bersaudara dilahirkan pada tanggal 01 November 1993 di Watampone dari ayah yang bernama H. Muhammad Arif dan Ibu Hj. Hasnah. Penulis memulai jenjang pendidikan dari tahun 2000 sebagai siswa di Sekolah Dasar 23 Jeppe'e di Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Al-Ikhlas Ujung di Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Watampone dan tamat pada tahun 2012. Di tahun 2012 penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Penulis juga tercatat pernah berkecimpung dalam organisasi di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan.